

KIM

Fenomena Pergantian Pimpinan Daerah, Inspirasi sang Doktor Hadirnya JFU Analisis Kebijakan di Jeneponto

Syamsir, HR - JENEPONTO.KIM.WEB.ID

Dec 9, 2021 - 10:52



JENEPONTO, SULSEL- Berjumpa Sang Doktor setelah beliau menyampaikan pidato akhir masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) di halaman Apel kantor Bupati Jeneponto pada Senin kemarin.

Dihadapan seluruh pejabat dan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan Kabupaten Jeneponto yang dikemas dalam apel Besar Gabungan, Syafruddin Nurdin atau lebih dikenal sang Doktor ini menyampaikan ucapan pamit dari jabatannya selaku Sekda.

"Tadi saya pamit karena tidak lama lagi saya beralih dari jabatan sekda ke Jabatan Fungsional Utama (JFU) sebagai Analisis kebijakan di daerah," ucap sang Doktor kepada Indonesiasatu.co.id, Kamis (09/12/2021).

Ditanya apa memotivasi beliau sampai menjadi pejabat Fungsional, dengan rileks beliau menuturkan bahwa peralihan jabatan ini menambah masa kepengsuniannya.

"Ia peralihan jabatan ini tentu menambah pensiun saya menjadi 65 tahun," tuturnya.

Lanjut sang Doktor jelaskan Fenomena Pergantian Pimpinan Daerah yang harus disikapi dengan baik yakni pergantian Bupati dan Wakil Bupati.

"Kita tahu bahwa regulasi administratif memberi ruang yang luas kepada siapapun, bisa menjadi Bupati dan Wabup," katanya.

Tidak hanya birokrat, akan tetapi juga profesi lainnya bisa politisi, pedagang dan lain lain.

Menurut dia, di beberapa daerah ada Bupati dan Wabup yang tidak paham pemerintahan karena berasal dari latar belakang yang bukan birokrat tulen, bisa dibayangkan bagaimana rumitnya seorang pengambil kebijakan yang harus menjaga sinkronisasi pusat, provinsi dan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan regulasi kalau tidak paham tentang adab dan tata kelola pemerintahan.

Kalau tohnya ada fase untuk belajar dan menyesuaikan diri, tutur sang Doktor, itu berarti periode pemerintahan bisa jadi tdk efektif, ada sekda yang berlatar belakang mumpuni dari sisi birokrasi yang bisa jadi pendamping.

Namun, itu tidak cukup. Seban, ada keterbatasan kewenangan kata kalau Bupati dan Wabup punya mau dan marah dikampungnya. Jika demikian hanya Tuhan yang maha tahu apa yang akan terjadi.

Olehnya itu, lanjut yang akrab disapa dr. Chapa ini dibutuhkan sebuah instrument dalam pemerintahan yang paham birokrasi tapi tidak punya beban dalam posisi keselamatan dan dlm jabatan yang bisa memberikan telaah kepemimpinan untuk membuat keputusan mengenai kebijakan yang lege arts.

Baginya, terpetiklah ide untuk menggagas sebuah Jabatan Fungsional Utama (JFU) dalam bidang analisis kebijakan yang ditempatkan di daerah.

Dia berpendapat bahwa idea ini tidak mudah sebab belum ada yang bisa dicontohi karena ini barang baru dan belum ada di kab kota lainnya. Terkecuali Kota Bogor.

"Kami bentuk Tim dan mencoba menterjemahkan pikiran ini dalam sebuah narasi yang menjadi konsep pertimbangan ke pusat, LAN pusat sebagai lembaga pendamping tertarik dengan idea ini sebagai sebuah exercise di daerah," imbuh sang Doktor.

Pendek cerita, advokasi berhasil meyakinkan lembaga lain, selain LAN Pusat yakni Menpan, BKN pusat, Mensesneg sampai terbitnya SK President dan mengangkat Dr.dr. H. Syafruddin Nurdin sebagai Pejabat dalam JFU Analisis Kebijakan yang ditempatkan di Daerah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Tentunya jabatan barunya ini, melekat pada bagian di Sekretariat Daerah dengan nilai Jabatan setingkat pejabat eselon li.

"Hasil ini, saya dapat tentunya setelah berproses, saya lulus administrasi yang ketat," katanya.

salah satu syaratnya sebut dia, bahwa harus berpangkat IV D dengan tingkat pendidikan S3 (Doktor) dan mampu memperlihatkan bukti fisik telaah kebijakan yang pernah dibuat selama menjadi pejabat dan memberikan bukti capaian hasil.

Tak hanya itu, sang Doktor pun mengaku diuji, baik secara langsung maupun ujian tertulis begitu juga dengan presentasi Visi Misi.

"Tugas kami sekarang ada dimana mana, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring," sebutnya.

Ditanya lagi, bagaimana ketika seandainya Bupati, Wabup dan Sekda tidak memanfaatkan sang Doktor. Dengan rileks sang Doktor menjawab inilah kebodohan pimpinan yang sulit dimaafkan dan kalau tidak digunakan telaah yang dibuatnya akan menjadi second opinion atas sikap mereka dan bisa jadi dokument, ini bahan provokasi kira kira begitu.

Kabarnya bapak tidak mendapat fasilitas dari Pemda seperti ruang kerja yang memadai dan tidak punya kendaraan dinas untuk kelapangan sambil berjalan.

sang Doktor secara santai lagi menjawab ini sebuah tempaan yang memperkuat jati diri dalam kematangan hidup untuk menatap Jeneponto 2024 pesan Moral beliau dalam bahasa Makassar " SAILEI BOKONU," pungkasnya.

Penulis: Syamsir

Editor: Cq